



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/756/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/6/2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Nomor B-115/ 100.3.2/Disperindagkopkm/VI/2025, tanggal 5 Juni 2025, hal Pengusulan Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor B-41.a/DPMPTSP/B.P/05/2025, tanggal 10 Juni 2025, hal Pengusulan Perubahan Perbup Nomor 51 Tahun 2021 dan Surat Inspektur Daerah Nomor 158/Insp/000.5.3.1//VI/2025, tanggal 23 Juni 2025, hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ 6/2025 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/6/2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/6/2025 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah lampiran daftar nama Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan menambahkan judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah yakni :
- a. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H.

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ 756/2025
TANGGAL : 16 JUNI 2025

**DAFTAR NAMA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
1	2	3
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026	Balitbangren
2.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025	Balitbangren
3.	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2025-2029	Balitbangren
4.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026	Balitbangren
5.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029	Balitbangren
6.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029	Balitbangren
7.	Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pajabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain	Badan Keuangan
8.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pajabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain	Badan Keuangan
9.	Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026	Badan Keuangan
10.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026	Badan Keuangan
11.	Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025	Badan Keuangan
12.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025	Badan Keuangan
13.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025	Badan Keuangan

14.	Standar Kebutuhan Barang	Badan Keuangan
15.	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layahuni Yang Bersumber dari APBD	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
16.	Pengesahan Sife Plan Perumahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
17.	Basis Data Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
18.	Basis Data Rumah pada Lokasi Rawan Bencana	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
19.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemrintah kabupaten Polewali Mandar	Inspektorat
20.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten	Inspektorat
21.	Pedoman Pengawasan dan Pencegahan Tindakan Kecurangan di Lingkup Pemeritah Kabupaten Polewali Mandar	Inspektorat
22.	Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat
23.	Biaya Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Inspektorat
24.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat
25.	Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Badan Keuangan (Bidang Verifikasi dan Perpendaharaan
26.	Standar Operasional Pelayanan Penerbitan SP2D Kabupaten Polewali Mandar	Badan Keuangan (Bidang Verifikasi dan Perpendaharaan
27.	Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kelurahan se Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
28.	Revitalisasi Posyandu	Dinas Kesehatan
29.	Tata Cara Pengangkatan Pegawai BLUD Puskesmas	Dinas Kesehatan
30.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
31.	Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu

32.	Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hajja Andi Depu	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu
33.	Standar Biaya Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hajja Andi Depu	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu
34.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025	Bagian Organisasi Setda
35.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Tahun 2025	Bagian Organisasi Setda
36.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Setda
37.	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
38.	Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
39.	Sisten Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.	Dinas Kesehatan
40.	Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
41.	Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
42.	Tata Cara Pembagian Pengelokasian dan Penggunaan ADD Tahun 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
43.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah	Organisasi
44.	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Organisasi
45.	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Organisasi
46.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Polewali Mandar	Baznas
47.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Perindag
48.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Bakeu

49.	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Inspektorat
50.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.	PTSP

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007